

Pendapatan Asli Daerah- Realisasi PAD Maros Capai 32,59 Persen



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/06/05/realisasi-pad-maros-capai-3259-persen/>

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga bulan Mei mencapai sekitar 32.59 persen. Realisasi sampai pertengahan Mei kata dia sekitar Rp92.539.912.278 atau 32.59 persen dari target Rp283 miliar.

Lebih lanjut kata dia, kalau dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD, yang realisasinya sudah melewati 30 persen baru enam OPD.

"Ada enam OPD yang realisasinya melewati 30 persen, yakni Bapenda, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan dan RSUD," katanya.

Sementara OPD yang belum mencapai 30 persen yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) dan Kopurindag.

Dia mengatakan ada berbagai kendala yang dihadapi OPD yang capaiannya masih rendah.

"Kalau Dinas Pariwisata kendalanya cuaca yang kurang mendukung, sehingga pengunjung lokasi wisata yg dikelola masih kurang," katanya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sedangkan Dinas Pertanian, kata dia, alsintannya diperiksa oleh BPK sehingga kurang maksimal dalam meraih retribusi sewa alsintan.

"Dinas Penanaman Modal masih kurangnya warga yang mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung. Dan Kopurindag banyak belum membayar sewa kios atau lods," sebutnya

Tahun ini PAD Maros ditargetkan sekitar Rp283.913.503.960

Dimana untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) targetnya sebesar Rp180 miliar dan capaiannya sekitar 30,87 persen atau Rp55 miliar.

Kemudian Dinas Perikanan yang ditarget Rp850 juta realisasinya sudah mencapai Rp317 juta atau 37,30 persen. Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan realisasinya mencapai 39,43 persen atau Rp138 juta dari target Rp350 juta.

Dinas Kesehatan ditarget Rp27 miliar berhasil mengumpulkan 36,35 persen atau Rp10 miliar. RSUD dr La Palaloi baru Rp21 miliar atau 39,40 persen dari target Rp54 miliar.

Sedang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Rp52 juta atau 34,93 persen dari target Rp150 juta.

Untuk empat OPD yang belum melampaui target 30 persen, seperti Dinas Pertanian baru menghasilkan Rp123 juta atau 20,57 persen dari target Rp600 juta.

Selanjutnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga capaiannya sekitar Rp1,7 miliar atau 24,67 persen dari target Rp7 miliar.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan capaiannya Rp2,1 miliar atau 25,23 persen dari target Rp8,5 miliar.

Untuk Kopurindag capaian PAD nya sekitar Rp766 juta atau 20,99 persen dari target Rp3,6 miliar.

Terpisah Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengimbau agar OPD di Kabupaten Maros bisa menggenjot capaian PAD nya.

"Kita berharap agar semua OPD bisa lebih memaksimalkan dalam pencapaian targetnya," katanya.

Diakuinya biasanya capaian PAD baru maksimal di triwulan ketiga.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Memang kadangkala PAD biasanya lebih maksimal di triwulan ketiga dan keempat. Karena pajak PBB akan mulai terbayarkan, saat ini dengan terbitnya SPPT PBB masyarakat menggenjot agar capaian PAD bisa meningkat dan tercapai sesuai target," pungkasnya. (rin)

Ada juga, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan (Sulsel), UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Makassar II terus giat melakukan sosialisasi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu muatannya adalah pemberlakuan [pajak kendaraan alat berat](#) di Sulsel, termasuk untuk perusahaan yang memiliki unit kendaraan tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

Kepala UPT Wilayah Makassar II [Bapenda Sulsel, Muhammad Khadafi](#), menyampaikan bahwa pemberlakuan [pajak kendaraan alat berat](#) ini mulai berlaku sejak perda tersebut ditetapkan.

Ia menyebutkan, di wilayah kerjanya sendiri terdapat lima perusahaan yang masuk kategori wajib melakukan pembayaran [pajak kendaraan alat berat](#).

"Kalau di Makassar II, terdapat lima perusahaan yang telah didata dan diharapkan untuk melakukan pembayaran [pajak kendaraan alat berat](#)," tuturnya saat diwawancara Rakyat Sulsel, Sabtu (29/6/2024).

Namun, hingga saat ini baru satu perusahaan yang telah melakukan pembayaran [pajak kendaraan alat berat](#).

"Untuk seluruh 24 kabupaten dan kota, baru [PT Japfa](#) yang menjadi perusahaan pertama yang melakukan pembayaran [pajak kendaraan alat berat](#)," bebarnya.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk mengajak perusahaan yang memiliki kendaraan alat berat untuk sadar membayar pajak. Saat ini, [PT Japfa](#) menjadi perusahaan pertama yang melaksanakan kewajiban ini.

"Kami akan melakukan sosialisasi lanjutan untuk semua perusahaan yang memiliki kendaraan alat berat agar sadar [pajak kendaraan alat berat](#)," ujarnya.

Lebih jauh, [Muhammad Khadafi](#) berharap langkah [PT Japfa](#) dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Makassar untuk memperhatikan kewajiban perpajakannya.

"Pembayaran [pajak kendaraan alat berat](#) merupakan bentuk kedisiplinan terhadap peraturan dan dapat menjadi contoh yang baik bagi perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar. Pajak yang dibayarkan akan sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Provinsi Sulsel," kata [Muhammad Khadafi](#). (Abu/B)

Sumber Berita:

1. <https://s Sulsel.fajar.co.id/2024/06/05/realisasi-pad-maros-capai-3259-persen/>
2. <https://rakyat Sulsel.fajar.co.id/2024/06/30/pemberlakuan-perda-nomor-1-tahun-2024-upt-makassar-ii-bapenda-sulsel-sebut-pt-japfa-perusahaan-pertama-bayar-pajak-kendaraan-alat-berat/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.